

BAB V

RISET AKSI PARTISIPATIF DALAM KONTEKS BENCANA

LUMPUR LAPINDO

(Analisa Reflektif)

Menjadi bagian dari masyarakat adalah sebuah keniscayaan bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial. Melakukan interaksi, menjalin kerjasama dan menyusun visi dan misi kehidupan bersama merupakan rangkaian dalam menebus pengertian-pengertian, pemahaman, penghargaan-penghargaan yang kemudian mengerucut dalam sebuah kegotong-royongan. Dari kegotongroyongan itu adalah implementasi dari adanya cinta-kasih dalam kehidupan manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Masyarakat adalah cermin bagi diri kita sendiri. Ia yang akan berbicara soal kekurangan, kelebihan, kemampuan dan ketidakberdayaan yang kita miliki. Ia menghimpun masalah dan mengumpulkan ide-ide penyelesaian. Ia membangun kesepakatan. Ia pula yang menyimpan harapan dan cita-cita kita. Ia yang memberikan pandangan dalam menempuh perjalanan. Ia yang meneguhkan. Ia yang melemahkan. Ia yang menginspirasi. Dan ia yang memprovokasi.

Menjadi bagian dari bencana tentu saja bukan pilihan bagi sebagian besar masyarakat. Bencana bagaimanapun akan memecah kehidupan seseorang menjadi kepingan-kepingan lalu dipunguti kembali dalam rangka mempertahankan diri. Masyarakat desa Ketapang memang tinggal 43 KK, namun semangat untuk bertahan masih kukuh meskipun tidak banyak aset yang dapat dikembangkan.

Cita-cita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik sudah terancangkan di benak masing-masing masyarakat.

Hawa panas menyengat ketika kemarau dan hujan bercampur gas dari kolam lumpur, air tanah kotor dan bau menjadi masalah pertama yang harus dinikmati oleh masyarakat. Bukan merupakan ketidakwajaran sebab letaknya dari tanggul lumpur hanya berkisar sekitar 15 meteran saja. Tidak hanya itu, di rumah-rumah penduduk sesekali muncul percikan api dari tanah pekarangan juga tembok-tembok rumah yang retak. Hal ini lebih disebabkan karena penurunan tanah. Areal persawahanpun yang dulunya sekitar 46,39 ha kini mengalami penyempitan hingga lebih dari setengah dari luas sebelumnya karena mati atau karena tergusur proyek pembangunan penanggulangan.

Seringkali pula ditemukan biota sungai yang mengambang mati, terutama semenjak disempitkannya sungai-sungai untuk keperluan arteri hingga kini tampak seperti selokan-selokan yang tak berpenghuni. Padahal hampir seluruh warga memanfaatkan sungai sebagai sumber kebutuhan air sehari-hari. Hal tersebut diatas seolah mengisyahkan bahwa desa ini sudah tidak layak huni.

Namun masih ada 43 KK yang memilih untuk terjaga, bertahan diantara puing-puing, berusaha berdiri diantara polemik yang dilematis. 43 KK yang berjalan diantara ketiadaan menuju keberadaan.

A. Bangkitnya Komunitas Strategis Dalam Merespon Bencana

Pada dasarnya kegotongroyongan masyarakat desa Ketapang menandakan bahwa masyarakat desa ini merupakan masyarakat yang aktif dengan kegiatan kemasyarakatan, tidak hanya yang bergerak di bidang keagamaan saja melainkan juga yang bergerak di bidang perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan

keikutsertaan komunitas pengerajin tas di desa Ketapang yang didirikan oleh Bapak Mistah tahun 1999 dalam kepengurusan kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Tanggulangin. Selain itu dalam beberapa kegiatan seperti tahlilan yang diselenggarakan oleh muslimat NU setiap bulannya juga mengikutsertakan perempuan-perempuan desa Ketapang.

Pada tahun 2007, 3 orang dari perwakilan masyarakat diikutsertakan dalam pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan Yayasan Tanggul Bencana Indonesia yang memberdayakan masyarakat dengan basis tanggap bencana. Ketiga orang tersebut adalah Bapak Ubait An Najmusyakib, Bapak Masyhudi dan Bapak Sujak. Yayasan Tanggul Bencana Indonesia mengambil perwakilan dari warga untuk dijadikan sebagai *local leader* di daerahnya masing-masing dengan agenda kegiatan mitigasi bencana, seperti membina sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan tentang kebencanaan dan potensi-potensi bencana pasca semburan lumpur Lapindo, serta kegiatan pengevakasian jika sewaktu-waktu bencana terjadi.

Local leader yang ditunjuk juga diberikan keahlian untuk membentuk radio komunitas dengan memanfaatkan ORARI (Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia). Namun karena kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, dalam hal ini sosialisasi dan kegiatan pemberdayaan hanya didominasi oleh laki-laki paruh baya saja sehingga kelompok masyarakat lain terutama kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, perempuan dan orang tua tidak diorganisir dengan baik, oleh karena itu kegiatan ini cenderung muspro dan akhirnya pada akhir tahun 2008 kegiatan pengorganisasian ini dibubarkan.

Pasca dicanangkannya relokasi dalam Perpres No.7 Tahun 2012, masyarakat mengalami dilema. Di satu sisi masyarakat menyadari bahwa desanya sudah tidak lagi aman untuk dihuni, namun di sisi lain ganti rugi yang diberikan pemerintah nyatanya tidak mampu menambal kehidupan masyarakat yang sudah rusak sejak tahun 2006. Sehingga 43 KK memilih untuk bertahan di desa Ketapang dengan berbagai alasan. Kesadaran tentang ketidaknyamanan di desa Ketapang pada akhirnya melahirkan sebuah gagasan untuk menyelamatkan masyarakat korban lumpur Lapindo melalui langkah-langkah strategis yang mampu membuat masyarakat bertahan dengan baik.

Banyaknya komunitas-komunitas yang ada dalam masyarakat, nyatanya mampu menyokong terbentuknya komunitas baru berbasis tanggap bencana. Hal ini ditunjang dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas Laskar Lusi. Komunitas Laskar Lusi sangat berperan pada kehidupan masyarakat desa Ketapang, karena selain kegiatannya yang menyenangkan juga ditunjang dengan pelatihan-pelatihan yang menunjang kreatifitas masyarakatnya. Konsolidasi seringkali dilaksanakan oleh anggota komunitas ini, memahami kondisi desa, mempelajari manajemen kebencanaan, memetakan kerentanan dan melaksanakan pendidikan tanggap bencana kepada masyarakat menjadi tujuan dari terbentuknya komunitas Laskar Lusi.

B. Pendidikan Untuk Korban Lumpur

Pendidikan tanggap bencana merupakan langkah mitigasi bencana. Pendidikan ini merupakan alat yang paling mudah dalam mentransfer langkah-langkah mitigasi bencana. Pendidikan tanggap bencana ini dapat berupa penganalisaan bersama dengan masyarakat dalam hal ini anak-anak melalui model

“bermain belajar” tentang kebencanaan dan apa itu bencana serta bencana apa saja yang ada di sekitar mereka.

Upaya pengembangan diri dibutuhkan bagi anak-anak dan seluruh korban lumpur pada umumnya untuk mengembangkan diri dengan mewadahi kreatifitas yang mereka miliki sebagai langkah untuk “kembali” dari kehidupan kelamnya. Pengembangan diri ini dapat berupa mewadahi mereka sesuai keahlian masing-masing. Dengan demikian, mereka dapat mengeksplorasi kemampuan mereka dengan tujuan untuk menyelesaikan problematika yang mereka hadapi di kemudian hari.

Terdapat 24 peserta anak-anak yang setiap kali mengikuti kegiatan pembelajaran di komunitas ini. Mereka belajar dan bermain namun tanpa menghilangkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri yakni meningkatkan sumber daya manusia yang tahan akan bencana. Anak-anak yang pada awalnya hanya bermain di tanah pekarangan atau lapangan untuk menghabiskan waktu luangnya kini mereka memilih untuk ke sekolah alternatif yang dilaksanakan oleh komunitas Laskar Lusi. Pembelajaran memang tidak sekedar berisi tentang kebencanaan saja, melainkan juga membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar di sekolah formal.

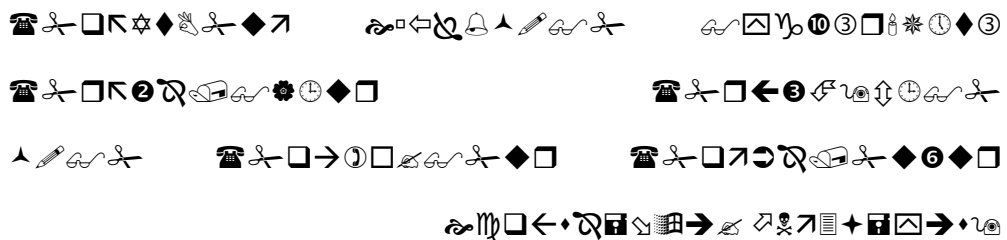
C. Konsep Islam Dalam Pendampingan Tanggap Bencana Berbasis Masyarakat Di Desa Ketapang

Pada hakikatnya bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arah bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh baik pada masa sebelum, pada saat terjadi dan setelah kejadian

bencana. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah manajemen khusus untuk menanganinya. Saat ini, dalam pengelolaan manajemen bencana, telah terjadi beberapa pola pergeseran pandangan, yaitu dari bersifat memberi tanggapan menjadi bersifat pencegahan, dari urusan pemerintah menjadi partisipatif masyarakat, dari tanggung jawab beberapa sektor menjadi tanggung jawab berbagai sektor, serta, dari pola menangani dampak menjadi mengurangi risiko.

Pada dasarnya, pengurangan risiko bencana (*Disaster Risk Reduction*) adalah sebagai pengarusutamaan (*mainstreaming*) berbagai aktivitas pembangunan. Pengarusutamaan ini ditujukan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan. Ini menjadi alasan kuat mengapa pengurangan risiko bencana tidak harus selalu dengan membuka sekolah atau program khusus mengenai bencana atau ilmu manajemen bencana. Sebagai arus utama, pengurangan risiko bencana sudah sepantasnya menjadi muatan yang harus diajarkan di semua kalangan masyarakat.

Dalam Alquran Surah Ali 'Imran ayat 200 dikatakan bahwasanya orang yang beriman untuk selalu dalam keadaan siaga sebelum akan terjadinya suatu yang membahayakan. Lebih Lanjut dijelaskan dalam Surat Al-Anaam ayat 131:





Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Hasyr 18)*

Ayat 18 dari Surat Al-Hasyr dikenal sebagai konsep perencanaan. Ulama terkemuka seperti Imam Al Ghazali menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah kepada manusia untuk memperbaiki, meningkatkan keimanan, dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui proses kehidupan yang tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya. Imam Ghazali juga memberi penegasan pada kata perhatikanlah di mana manusia harus memperhatikan setiap perbuatan yang telah dikerjakan, serta mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.¹

Konsep perencanaan siaga dalam Surat Al-Hasyr ayat 18 merupakan pokok pikiran yang sama dengan panduan penyusunan rencana kontinjensi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Ada lima aspek yang dapat dilihat dari kesamaan konsep perencanaan tersebut. Pertama, perencanaan harus melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan (analisis dampak), kedua, keadaan masa depan yang diinginkan dibandingkan dengan kenyataan sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangannya (analisis kesenjangan). Ketiga, untuk menutup kesenjangan perlu dilakukan usaha yang dapat dilakukan

¹ Affeltranger, Bastian, dkk. 2008. *Hidup Akrab dengan Bencana*. (Jakarta: MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia)) Hal. 105

dengan berbagai ikhtiar dan alternatif (skenario kedaruratan). Keempat, perlu pemilihan alternatif yang baik, dalam hal ini mencakup efektifitas dan efisiensi (alokasi tugas dan sumber daya). Kelima, alternatif yang sudah dipilih hendaknya dirinci untuk dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan (sinkronisasi dan harmonisasi).

D. Mengkomunikasikan Dakwah Bil Hal Dalam Pemberdayaan Riset Aksi Partisipatif

Problem mendasar bagi mayoritas umat islam adalah sulitnya merumuskan desain masa depan tanpa mengubah struktur yang ada. Terkadang struktur yang ada justru malah menenggelamkan diri masyarakat dalam ketidakberdayaan. Hal inilah yang mengakibatkan lemahnya kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi persoalan yang dihadapi. Perubahan sosial akibat berubahnya struktur dan tatanan yang telah terjaga seringkali menyisahkan puing-puing dan menambah panjang benang persoalan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai muslim yang berbangsa dan bernegara, kita membutuhkan sebuah desain gerakan dakwah bil hal yang masif untuk menjawab permasalahan itu. Sebuah desain yang tidak hanya berorientasi kekinian, tapi juga menjangkau masa depan. Desain tersebut ialah korporatisasi usaha bersama. Tujuan korporatisasi usaha individu umat sejalan dengan tujuan dakwah, yakni eksistensi dakwah mengubah realitas sosial yang ada ke realitas sosial yang baru.² Dakwah tidak hanya terfokus pada masalah agama, tapi harus mampu menjawab realitas yang dihadapi masyarakat.

² <http://www.jpnn.com/read/2013/07/09/180832/Dakwah-bil-Hal:-Korporatisasi-Usaha-Individu-Umat-Menuju-Indonesia-Maju> (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2014)

Ke depan umat harus yakin bahwa "usaha bersama" lebih baik daripada "usaha sendiri" yang kecil-kecil. Korporatisasi -tidak harus dalam pengertian membuat perusahaan, apalagi konglomerasi- akan mengubah desain ekonomi umat masa depan. Korporatisasi ini dalam konsep Asset Based Community Development terwujud dengan terbentuknya komunitas dan jejaring sosial untuk meneguhkan eksistensi dari komunitas tersebut.

Pada akhirnya tujuan dari dakwah adalah mentransformasi masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang tercerahkan oleh cahaya Islam. Masyarakat seperti ini sering kali disebut sebagai masyarakat madani. Pada tulisan KH. Mas'ood Abidin yakni mengenai "Implementasi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Beliau menerangkan bahwa madani mengandung kata *maddana al-madaina, banaa-ha* (membangun) atau *hadhdhara* (memperadabkan), dan *tamaddana* (menjadi beradab) yang nampak dalam kehidupan masyarakat yang berilmu (rasional) serta memiliki rasa (emosional) baik secara individu maupun kelompok, serta memiliki kemandirian (kedaulatan/harga diri) dalam tata ruang dan peraturan-peraturan yang saling berkaitan.³

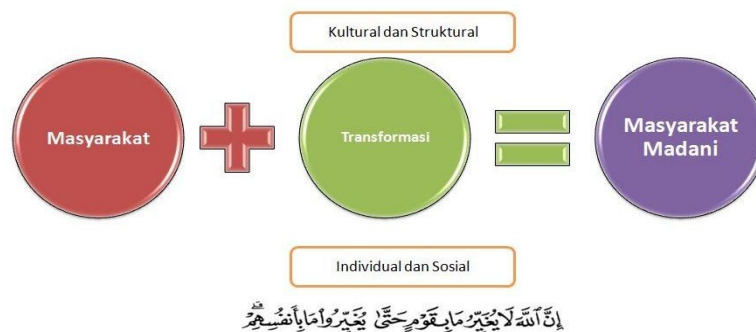
Merujuk pada referensi lain, pada tulisannya "Menuju Masyarakat Madani", cendekiawan muslim Nurcholish Madjid menyatakan bahwa secara konvensional perkataan *madinah* memang diartikan sebagai *kota*. Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna *peradaban*. Dalam bahasa

³ Yusuf, Ridwansyah. 2007. *Risalah Manajemen Dakwah Kampus* (Bandung: Gamais Press) Hal.17

Arab, *peradaban* memang dinyatakan dalam kata *madaniyah* atau *tamaddun*, selain dalam kata *hadharah*.⁴

Karena itu tindakan Rasulullah mengubah nama Yastrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebagai sebuah pernyataan niat atau proklamasi bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat yang beradab.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat berbudaya dan *al-madaniyyah* (*tamaddun*) yang maju, modern, *berakhlaq* dan memiliki peradaban. Mereka melaksanakan ajaran agama (*syariah*) dengan benar. Agama (Islam) tidak dibatasi oleh ruang semata, seperti masjid, langgar, pesantren atau majelis *ta'lim*, namun agama juga menata gerak kehidupan nyata berupa tatanan politik pemerintahan, sosial-ekonomi, seni budaya, hak asasi manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang hidup senang dan makmur dengan aturan atau *syariah* yang melindungi hak-hak pribadi, kepemilikan, dan hak-hak sipil masyarakatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat kuat, berpendidikan, dan siap dengan kondisi apapun.



⁴ Yusuf, Ridwansyah. 2007. *Risalah Manajemen Dakwah Kampus* (Bandung: Gamais Press) Hal.18

PENUTUP